

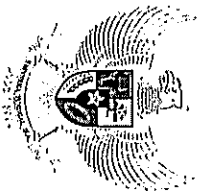


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/PMK.03/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

**Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain,
Rincian Jenis Data dan Informasi, Bentuk Data, Cara dan Jadwal Penyampaian**

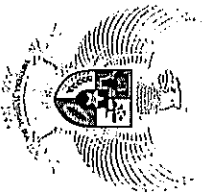
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Data Penginderaan Jauh, meliputi: I. Data penginderaan jauh yang diterima stasiun bumi LAPAN, meliputi: a. Data Resolusi Menengah b. Data Resolusi Tinggi	Citra yang dihasilkan dari perakaman menggunakan wahana satelit, baik yang merupakan arsip maupun akuisisi baru. Data Resolusi Menengah meliputi Data Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, SPOT 2, dan SPOT 4. Data Resolusi Tinggi meliputi Data SPOT 5 dan SPOT 6.	Elektronik	Langsung dan/atau Online	1 Februari 2014	Tahunan (Bulan Februari)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data penginderaan jauh yang tidak diterima stasiun bumi LAPAN, tetapi dimiliki oleh LAPAN.	LAPAN akan mendistribusikan Data Penginderaan Jauh yang tidak diterima Stasiun Bumi LAPAN, tetapi dimiliki oleh LAPAN tidak dalam bentuk <i>Raw Data</i> .				
30	PT Jamsostek (Persero)	I. Data Pendaftaran Perusahaan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP 5. Bentuk Badan Hukum 6. Jenis Usaha Utama 7. Kepemilikan 8. Jumlah Tenaga Kerja		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

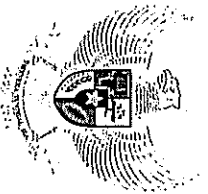
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Tenaga Kerja Peserta Jamsostek, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Peserta 2. Nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 3. Alamat Peserta 4. NPWP Peserta 5. Tanggal lahir		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya)
		III. Rincian Iuran Tenaga Kerja, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 2. Periode/masa Laporan 3. Data Upah 4. Iuran JKK 5. Iuran JKM 6. Iuran JPK 7. Iuran JHT TK		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		8. Iuran JHT Perusahaan					
		IV. Data Pendaftaran Proyek Konstruksi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pendaftaran 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Sumber Pembiayaan Proyek 5. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (NKKK) 6. Nilai Komponen Upah dari NKKK 7. Macam/jenis Pekerjaan 8. Lokasi Proyek 9. Nomor IMB-PB 10. Tanggal IMB-PB 11. Nomor IMB 12. Tanggal IMB 13. Pemilik Proyek		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Nama Instansi (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
(1)		14. Jumlah Tenaga Kerja 15. Masa Pertanggungangan/ Masa Kontrak 16. Jenis Pertanggungangan					
31	Pr Sucofindo	V. Daftar Tenaga Kerja Keluar, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 2. Nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) 3. Nama Tenaga Kerja		Elektronik	Langsung	1 Maret 2014	Tahunan (paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya)
		Data survei atas produk pertambahan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 1. Alamat Eksportir 2. NPWP 3. NPWP II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara a) ADB Gross b) ARB Gross c) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/ Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD) IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(1) No Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2) Nama Instansi	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
32	PT Surveyor Indonesia	V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. NPWP VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Ekspor 1. Nama Ekspor		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

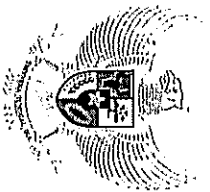
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 1. Alamat Eksportir 2. NPWP 3. NPWP II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara 1) ADB Gross 2) ARB Gross 3) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/ Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD) IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	PT Carsurin	3. Nama Kapal 4. Nama Perusahaan Pembeli 5. Negara/Tujuan V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. NPWP VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan	Data survei atas produk pertambahan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir 2. Alamat Eksportir	Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>3. NPWP</p> <p>II. Data Uraian Barang 1. Deskripsi Barang 2. Kode HS</p> <p>III. Data Komoditas 1. Kalori Batubara a) ADB Gross b) ARB Gross c) ARB Nett 2. Kandungan Mineral/ Konsentrat 3. Satuan (Unit) 4. Volume (Tonase) 5. Nilai FOB (USD)</p> <p>IV. Data Pengapalan 1. Waktu Pengapalan 2. Pelabuhan Muat</p>					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

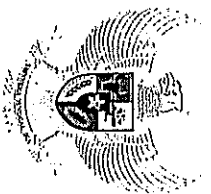
(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
34	PT Geoservices	Data survei atas produk pertambangan, yang paling sedikit memuat: I. Data Eksportir 1. Nama Eksportir 2. Alamat Eksportir		Elektronik	Langsung	25 Februari 2014	Bulanan (paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

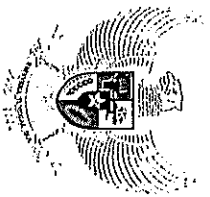
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. NPWP</p> <p>II. Data Uraian Barang</p> <p>1. Deskripsi Barang</p> <p>2. Kode HS</p> <p>III. Data Komoditas</p> <p>1. Kalori Batubara</p> <p>a) ADB Gross</p> <p>b) ARB Gross</p> <p>c) ARB Nett</p> <p>2. Kandungan Mineral/ Konsentrat</p> <p>3. Satuan (Unit)</p> <p>4. Volume (Tonase)</p> <p>5. Nilai FOB (USD)</p> <p>IV. Data Pengapalan</p> <p>1. Waktu Pengapalan</p> <p>2. Pelabuhan Muat</p> <p>3. Nama Kapal</p>					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPPI)	I. Data Pemegang Jjin Akuntan Publik yang sudah menjadi anggota IAPPI, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Akuntan Publik 2. Alamat AP 3. Nomor CPA 4. Tanggal CPA V. Identitas Surveyor 1. Nama 2. Alamat 3. NPWP VI. Laporan Surveyor 1. Nomor laporan 2. Tanggal laporan		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Plhak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 5. Nomor Anggota IAPI 6. Tanggal Anggota IAPI 7. Nomor Izin AP 8. Tanggal Izin AP 9. Kantor Akuntan Publik 10. Terdaftar di OJK (ya/tidak)	(4)	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 1 Februari 2014	(8) Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

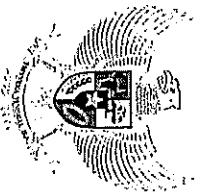
(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
36	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPJ)	1. Data Anggota Penilai, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Anggota Penilai 2. Alamat Anggota Penilai 3. Tempat Lahir 4. Tanggal Lahir 5. Klasifikasi Penilai 6. Nama Kantor Jasa Penilai Publik 7. Nomor Keanggotaan 8. Tanggal Keanggotaan 9. Status Keanggotaan 10. Nomor Registrasi PPAJP/OJK		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

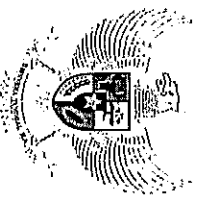
No Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
	II. Data Kantor Jasa Penilai Publik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama KJPP 2. Alamat KJPP 3. Nomor Izin Usaha KJPP 4. Tanggal Izin Usaha KJPP 5. Nama Rekan Persekutuan 6. Keterangan Rekan Persekutuan 7. Nomor Registrasi PPAJP/OJK			Elektronik	Langsung	1 Februari 2014 Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
37 Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi	Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi 2. Nama Pemilik 3. Alamat	Cukup jelas		Elektronik	Langsung	15 Maret 2014 Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	1. Data Kepemilikan Hotel/Penginapan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Hotel/Penginapan 2. Alamat Hotel/Penginapan 3. Jumlah kamar 4. Kelas hotel 5. Nama Pemilik/Pengelola 6. Alamat Pemilik/Pengelola	Cukup jelas	Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 7. Jumlah Pajak Hotel	(4) Cukup jelas	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 15 Maret 2014	(8) Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		II. Data Kepemilikan Restoran, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Restoran 2. Alamat Restoran 3. Nama Pemilik/Pengelola 4. Alamat Pemilik/Pengelola 5. Kapasitas Pengunjung 6. Jumlah karyawan 7. Jumlah Pajak Restoran					
		III. Data Usaha Hiburan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Usaha Hiburan 2. Alamat Usaha Hiburan 3. Nama Pemilik/Pengelola 4. Alamat	Cukup jelas	Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

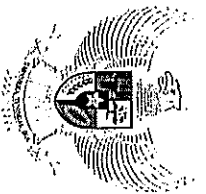
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) Pemilik/Pengelola 5. Jenis Hiburan 6. Jumlah Pajak Hiburan	(4) IV. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang paling sedikit memuat: 1. Nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 2. Alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan 3. Alamat objek 4. Nilai perolehan objek pajak 5. Luas tanah dan atau bangunan	Cukup jelas	Elektronik	Langsung	15 Maret 2014 Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

(1) No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 6. Tanggal Transaksi 7. Nilai BPHTB V. Data Surat Izin Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Jenis Usaha 5. Nama Pemilik 6. Alamat Pemilik 7. Klasifikasi 8. Modal 9. Jumlah karyawan 10. Masa berlaku	(4) Cukup jelas	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 15 Maret 2014	(8) Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)
		VI. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin	Cukup jelas	Elektronik	Langsung	15 Maret 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari tahun berikutnya)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

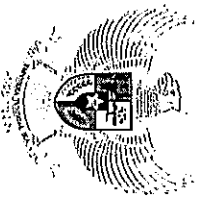
(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
39	Pengelola Nama <i>Domain</i> Internet Indonesia (PANDI)	I. Kontak <i>Registrar</i> , yang paling sedikit memuat: 1. ID Kontak 2. Nama Organisasi Pendaftar 3. Alamat 4. Kota 5. Provinsi	Informasi kontak <i>Registrar</i> atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

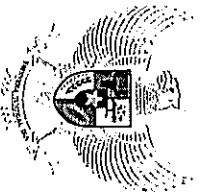
No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) 6. Kode Pos 7. Negara 8. Alamat <i>E-mail</i> II. Data <i>domain</i> , yang paling sedikit memuat: 1. Nama <i>domain</i> 2. Tanggal <i>domain</i> dibuat 3. Tanggal pemuktakhiran terakhir 4. Tanggal daluarsa 5. Nama <i>Registrar</i> 6. Status 7. Nama <i>Server</i>	(4) Informasi atas domain .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 1 Oktober 2013	(8) Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3) III. Kontak <i>admin</i> atas <i>domain</i> , yang paling sedikit memuat: 1. ID kontak 2. Tanggal kontak <i>admin</i> dibuat 3. Nama <i>admin</i> 4. Nama organisasi 5. Alamat 6. Kota 7. Provinsi 8. Kode Pos 9. Negara 10. Alamat <i>E-mail</i> 11. Nomor Telepon 12. Nomor faksimili	(4) Informasi data <i>Registrar</i> atas <i>domain .co.id, .web.id, .or.id,</i> <i>.net.id, .biz.id, .my.id</i>	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 1 Oktober 2013	(8) Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

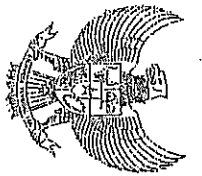
(1) No	(2) Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(3) Rincian Jenis Data dan Informasi	(4) Deskripsi	(5) Bentuk Data	(6) Cara Penyampaian	(7) Penyampaian Pertama Kali	(8) Jadwal Penyampaian
		IV. Kontak Penagihan atas <i>domain</i> , yang paling sedikit memuat: 1. ID Kontak 2. Tanggal kontak penagihan dibuat 3. Nama <i>Registrar</i> 4. Nama Penanggung Jawab 5. Nama Organisasi Tertagih 6. Alamat 7. Kota 8. Provinsi 9. Kode pos 10. Negara 11. Alamat <i>E-mail</i> 12. Nomor Telepon	Informasi kontak penagihan atas domain <i>.co.id</i> , <i>.web.id</i> , <i>.or.id</i> , <i>.net.id</i> , <i>.biz.id</i> , <i>.my.id</i>	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Kontak teknis atas <i>domain</i> , yang paling sedikit memuat: 1. ID Kontak 2. Tanggal kontak teknis dibuat 3. Nama <i>Registrar</i> 4. Nama Penanggung Jawab 5. Nama Organisasi 6. Alamat 7. Kota 8. Provinsi 9. Kode pos 10. Negara	Informasi kontak teknis atas <i>domain</i> .co.id, .web.id, .or.id, .net.id, .biz.id, .my.id	Elektronik	Langsung	1 Oktober 2013	Semesteran (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Alamat <i>E-mail</i> 12. Nomor Telepon 13. Nomor faksimili					

: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUMAS

U. P. KEUANGAN REPUBLIK

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP. 195904201984021001